

BAB III

Kebijakan Amerika Serikat Di Laut China Selatan Sebelum Era Kepemimpinan Obama

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang bentuk keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan. Dimana dalam pembahasan yang akan penulis jabarkan pada bab ini meliputi; bentuk dari keterlibatan Amerika Serikat di Laut China Selatan pada dua era sebelum kepemimpinan Obama yaitu, era kepemimpinan Bill Clinton dan Gorge W. Bush, serta gambaran umum tentang keterlibatan yang dilakukan Amerika Serikat di Laut China Selatan.

Dua era kepemimpinan yang penulis pilih ini didasarkan pada tahun jabatan disetiap eranya, yang mana pada masa tersebut beberapa insiden di kawasan konflik mulai memanas dengan jumlah negara pengklaim yang juga bertambah. Dalam rentang waktu yang sama dengan dua mantan pemimpin Amerika Serikat ini, tindakan agresif yang dilakukan salah satu negara pengklaim pun kian mengundang perseteruan dengan negara pengklaim lainnya. Selain itu, dua era kepemimpinan ini merupakan dua era kepemimpinan yang paling dekat dengan era kepemimpinan yang penulis pilih sebagai jangkauan penelitian, yaitu masa jabatan Obama.

A. Kebijakan Amerika Serikat di Laut China Selatan era Kepemimpinan Bill Clinton

Menjabat sejak tahun 1993 sampai dengan 2001, Bill Clinton merupakan presiden Amerika Serikat ke-42 yang memimpin selama dua periode didampingi Al Gore sebagai wakilnya. Berangkat dari partai yang mengusungnya dalam pemilihan presiden

yaitu, Demokrat, Bill Clinton secara jelas memiliki bentuk kebijakan yang berbeda dengan presiden sebelumnya, George H. W. Bush yang berasal dari partai Republik.

Jika pada masa kepemimpinan sebelumnya ruang lingkup kebijakan luar negeri Amerika Serikat begitu menaruh prioritas pada isu keamanan maupun tujuan nasional, maka Clinton mulai menyertakan demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam prioritasnya. Namun pada masa kepemimpinannya, Bill Clinton memilih untuk sedikit meninggalkan sederet kebijakan luar negeri dan lebih memilih untuk meletakkan kebijakan dalam negeri sebagai prioritas utama. Meski begitu, perkembangan hegemoni dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi topik yang dirasa mampu membangun jembatan untuk prioritas awal.

Hal ini juga dilatar belakangi oleh kondisi Amerika Serikat yang pasca Perang Dingin berada dalam posisi dominan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekonomi Amerika Serikat 40 persen lebih besar daripada saingan terdekatnya, dan pembelanjaan pertahanannya sama dengan gabungan enam negara berikutnya. Empat dari enam negara ini adalah sekutu dekat Amerika Serikat, jadi keuntungan Amerika Serikat saat itu bahkan lebih besar dari angka-angka sebelumnya (Walt, 2000, p. 64). Selain itu, posisi menguntungkan Amerika Serikat juga sudah menjadi kekuatan dominan, dalam artian bahwa Amerika Serikat saat itu juga tidak memiliki musuh serius di belahannya sendiri. Cita-cita Amerika tentang pasar bebas dan hak-hak individu lebih diterima secara luas daripada sebelumnya (Walt, 2000, p. 65).

Dikarenakan kondisi tersebut serta status opini publik tidak dapat dipisahkan, masyarakat Amerika Serikat kemudian tidak merasa begitu tertarik pada

kebijakan luar negeri karena mereka mengakui betapa menguntungkan situasi saat itu. Jadi mereka memilih seorang presiden yang berjanji untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di telepon dengan para pemimpin asing dan lebih banyak waktu untuk melakukan pembahasan mengenai masalah-masalah domestik saja (Walt, 2000, p. 65). Pada awal masa jabatannya pun Clinton memulainya dengan mandat yang lemah serta hubungan yang rumit dengan militer, tidak sampai disitu, Clinton juga harus bergulat dengan Kongres yang saat itu didominasi Partai Republik, secara terbuka bersikap skeptis terhadap banyak lembaga internasional, waspada terhadap komitmen baru, dan menganut *chimera* strategis seperti pertahanan rudal nasional (Walt, 2000, p. 66).

Meski begitu, pada masa kepemimpinannya Clinton setidaknya mampu mencapai empat gol terkait kebijakan luar negeri. Pertama, Amerika Serikat telah berusaha untuk meredam persaingan keamanan dan mengurangi risiko perang besar di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah, sebagian besar dengan tetap terlibat secara militer di masing-masing wilayah ini. Kedua, Amerika Serikat telah bekerja untuk mengurangi ancaman senjata pemusnah massal (WMD). Ketiga, Amerika Serikat telah mencoba mendorong ekonomi dunia yang lebih terbuka dan produktif, yang dipandang juga sebagai komponen penting kemakmuran ekonomi dalam negerinya sendiri. Keempat, Amerika Serikat telah mencoba untuk membangun sebuah tatanan dunia yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Amerika Serikat dengan mendorong pertumbuhan demokrasi dan dengan menggunakan kekuatan militer terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang besar (Walt, 2000, pp. 66-67).

Dalam hal kepentingan nasional, Amerika Serikat memiliki kepentingan abadi dalam perdama-

ian, ini dikarenakan konflik global dalam skala besar akan mengancam keunggulannya. Strategi pilihan pemerintahan Clinton untuk menjaga perdamaian saat itu adalah menjaga keamanan Amerika Serikat di Eropa dan Asia sambil mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara besar lainnya dan mendukung upaya perdamaian regional jika diperlukan. Strategi ini bersandar pada keyakinan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat yang maju masih merupakan penghalang yang paling dapat diandalkan terhadap persaingan kekuatan-kekuatan baru yang diperbarui. Tetapi karena dukungan publik untuk kebijakan ini rapuh, Clinton telah membatasi peran langsung Amerika Serikat dan mendorong sekutu kunci untuk menanggung beban yang lebih berat. Meskipun banyak kendala, pemerintah telah menerapkan strategi ini secara efektif (Walt, 2000, p. 67).

Di Asia sendiri, Clinton telah membawa Amerika Serikat terlibat dalam beberapa isu keamanan, diantaranya; menanggapi serta menangani perjanjian nuklir, dan berhasil mencapai perjanjian konvensi senjata kimia. Isu yang banyak menyita perhatian adalah tindakan Amerika Serikat yang berusaha menahan Korea Utara untuk memperoleh persenjataan nuklir, dan berakhir dengan disetujuinya solusi diplomatik yang mana Korea Utara bersedia menghentikan produksi *plutonium* pada badan riset mereka (Walt, 2000, p. 72). Tidak hanya isu senjata nuklir dan kimia lainnya, Amerika Serikat juga kemudian menaruh keterlibatannya dalam isu keamanan regional kawasan.

Laut China Selatan merupakan salah satu dari isu kawasan yang menjadi perhatian Amerika Serikat sejak lama. Menelisik dari aspek kepentingan, Amerika Serikat jelas memiliki sederet kepentingan nasional di kawasan sengketa ini. Namun, secara garis besar,

pemerintahan Clinton tidak secara serta-merta kemudian memberikan tindakan agresif mengingat saat itu kekuatan baru di Asia mulai menunjukkan eksistensinya. Pendekatan melalui hubungan kerjasama menjadi pilihan Clinton dalam membawa kehadiran Amerika Serikat di kawasan sengketa. Terlebih dengan terlibatnya Filipina sebagai negara pengklaim yang merupakan sekutu Amerika Serikat sendiri.

Amerika Serikat secara terikat memiliki Perjanjian Pertahanan Mutual dengan Filipina sejak 30 Agustus 1951. Adapun menurut Pasal 4 dalam perjanjian tersebut ialah;

“Setiap pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik di salah satu pihak akan berbahaya bagi kedamaian dan keamanannya sendiri dan menyatakan bahwa ia akan bertindak untuk memenuhi bahaya umum sesuai dengan proses konstitusionalnya.” (Defense, 1951).

Dimana meskipun Washington tidak pernah mengakui klaim Manila terhadap rantai Pulau Spratly, konfrontasi antara China dan Filipina atas kepulauan inilah yang kemudian dengan mudah meningkatkan serta menarik pasukan militer milik Amerika Serikat untuk diturunkan (Rowan, 2005, p. 431).

Hal ini juga didukung dengan keputusan Filipina yang kala itu akhirnya memutuskan untuk mengikut sertakan Amerika Serikat lewat kerjasama keduanya dalam *Visiting Forces Agreement* (VFA). Sebelumnya, pada tahun 1991 VFA telah lebih dahulu disetujui oleh pemerintah Filipina, namun kembali direvitalisasi pada 1999. Bukan tanpa sebab Filipina akhirnya memutuskan untuk melibatkan Amerika Serikat sebagai tamengnya, ini juga dikarenakan kondisi militer Manila yang lemah serta munculnya an-

caman dari China sebagai negara pesaing klaim yang lebih kuat dan mulai memperluas kedudukan klaimnya (Velasco, 2015, p. 83).

Dari empat negara ASEAN yang menjadi pengklaim kawasan di Laut China Selatan, Filipina memiliki kemampuan penegakan militer terlemah. Angkatan bersenjata milik Filipina mengalami permasalahan kekurangan dana, tidak memiliki persenjataan yang lengkap, dan dengan pasukan khusus yang masih kurang terlatih. Angkatan udara menerbangkan Filipina hampir tidak memiliki pesawat tempur yang sesuai dengan ketetapan, serta kapal angkatan laut yang nyaris tidak layak berlayar (Simon S. W., 2012, p. 1005). Sehingga dengan adanya VFA, Filipina setidaknya mampu menghadirkan kekuatan baru bagi pasukan garda terdepannya.

Namun, VFA juga menjadikan Amerika Serikat kemudian memiliki akses untuk memasuki maupun melakukan operasi darat serta menggelar latihan bersama dengan pasukan milik Filipina, sehingga kesempatan yang Amerika Serikat miliki untuk mampu menjangkau kawasan sengketa pun terbuka. Mengingat Washington jelas memiliki kepentingan disini, dan jalinan kerjasama dengan Manila merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kepentingannya. Pesatnya perkembangan China serta kemampuannya yang mulai menunjukkan eksistensi dominasi di kawasan Asia menjadi perhatian tersendiri.

Selain melakukan hubungan kerjasama dengan Filipina, Amerika Serikat pada era kepemimpinan Bill Clinton kemudian juga membangun kerjasama yang baik dengan Vietnam. Pada tanggal 3 Februari tahun 1994, untuk pertamakalinya pemerintahan Amerika Serikat memberikan perubahan

kebijakan perihal embargo perdagangan bagi Vietnam (CSEA, 2010, p. 351). Jika mengingat kebelakang, embargo yang Vietnam terima telah berlangsung selama 19 tahun sampai akhirnya pemerintahan Clinton memberi kebijakan penghapusan embargo meski dalam rentang waktu yang ditentukan.

Pencabutan embargo ini juga bertujuan untuk memberikan peluang bagi Vietnam dalam membangun satuan militernya. Hal ini dikarenakan persenjataan pasukan militer Vietnam yang tidak mengalami pembaharuan sejak adanya sanksi embargo dari Amerika Serikat sendiri. Persenjataan milik Vietnam yang selama masa embargo didapatkannya dari pembelian senjata pada Rusia tergolong jenis senjata yang sudah berusia, sehingga Vietnam membutuhkan persenjataan baru yang lebih mampu diandalkan. Oleh karena itu, dengan dibangunnya kembali kekuatan militer Vietnam, Amerika Serikat mengharapkan akan dapat membendungnya *kekuatan baru* yang juga naik kepermukaan.

Tidak sampai disitu saja, negara yang resmi bergabung menjadi anggota ke-7 dalam organisasi regional ASEAN pada tahun 1993 ini, ditahun yang sama juga untuk pertamakalinya menyepakati klaim properti dan mendirikan kantor kedutaan di Hanoi dan Washington. Sehingga pada tahun 2000 menjadi tahun William Cohen menjadi Sekretaris Pertahanan dan Bill Clinton selaku presiden masa itu menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama mengunjungi Vietnam (CSEA, 2010, pp. 351-352).

Namun begitu, tindakan yang Amerika Serikat lakukan tentu saja disertai dengan kepentingannya yang menyangkut isu keamanan di kawasan Asia. Clinton sendiri meskipun tidak menaruh kebijakan luar negeri sebagai unsur prioritasnya, namun perkem-

bangun aliansi dirasa perlu terus berlanjut meskipun tidak relevan dengan prioritas utama negara. Terlebih kawasan sengketa telah lama menjadi jalur perjalanan kapal patroli bagi Amerika Serikat yang menamai dirinya sebagai 'polisi dunia'. Diluar itu, Vietnam kemudian menjadi negara yang membentuk aliansinya bersama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.

B. Kebijakan Amerika Serikat di Laut China Selatan era Kepemimpinan George W. Bush

Jika sebelumnya Bill Clinton begitu menaruh prioritas utama pada kebijakan dalam negeri, maka George W. Bush tidak banyak tertarik pada kebijakan di dalam dan tentang Amerika Serikat sendiri. George W. Bush memulai masa kepemimpinannya dengan pendekatan yang tidak memihak dan terkesan kurang lancar dalam komunikasi publik. Bush juga tidak berbicara kepada publik sesering yang dilakukan oleh pemimpin Amerika Serikat sebelumnya, dan presentasi publik yang Bush miliki terkesan canggung dan kasar (Greenstein, 2002, p. 395).

Berangkat dari latar belakang keluarga dan pengalaman politik yang matang, Bush kemudian mampu menyusun tim kabinetnya dalam tatanan menakjubkan. Dick Cheney sebagai pasangannya, Sekretaris Negara Colin Powell, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, dan Penasihat Keamanan Nasional Condoleezza Rice, yang mana merupakan salah satu tim keamanan nasional paling berpengalaman dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat yang pernah ada (Greenstein, 2002, pp. 394-95). Pilihan Bush terhadap timnya ini jelas berpengaruh pada keputusannya dalam menentukan arah kepentingan, maupun kebijakan. Sehingga tidak mengherankan ketika pada masa kepemimpinan Bush, peranan tim pilihan presiden ke-43 Amerika Serikat ini mampu memberikan

pengaruh yang baik bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat itu.

Intensitas pergerakan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat kala itu juga mendapatkan banyak sambutan dari kalangan global. Sebagian besar pihak yang menangkap sinyal pergerakan Amerika Serikat lebih menaruh pada bentuk intervensi. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk kebijakan luar negeri yang juga pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Bush dianggap lebih agresif dan mengutamakan *hard power* sebagai gertakannya, terlebih pasca tragedi 9/11¹³. Karena pasca serangan 9/11 yang meruntuhkan gedung WTC itu, arah kebijakan Bush kemudian mulai condong untuk memerangi terorisme (Greenstein, 2002, p. 394).

Pada bulan Oktober 2007, Amerika Serikat mengeluarkan strategi maritim baru yaitu, "Strategi Komprehensif untuk Kekuatan Laut abad ke-21" (CS21). Ini kemudian menegaskan bahwa "kekuatan tempur redibel akan terus diposisikan di Pasifik Barat dan Teluk Arab / Samudera Hindia" untuk melindungi "kepentingan vital" dan meyakinkan teman-teman dan sekutu komitmen Amerika Serikat untuk keamanan regional dan membuka jalur komunikasi laut dan perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah memodifikasi postur pertahanan Asia Pasifiknya untuk membawa pasukan lebih dekat ke jalur laut Asia (Simon S. W., 2012, pp. 1011-10012).

Namun begitu, kebijakan luar negeri Bush tetap melingkupi aspek keamanan kawasan dan

¹³ Aksi bom bunuh diri yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda dengan menabrakkan dua pesawat komersil milik Amerika Serikat ke gedung WTC yang juga merupakan *icon* kapitalisme di Amerika Serikat.

kepentingan nasional. Sehingga melanjutkan dari kerjasama yang telah dibangun oleh presiden sebelumnya, Bush ikut andil dalam keterlibatannya selama masa jabatan sebagai presiden Amerika Serikat sebagai *partner* sekaligus pihak pengintervensi –seperti yang beberapa pihak tuduhkan– pada beberapa isu yang terjadi. Laut China Selatan merupakan salah satu dari kawasan sengketa dengan keterlibatan Amerika Serikat yang berkelanjutan di wilayahnya. Meski berdasarkan pada letak geografisnya keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa Laut China Selatan selalu mendapat tanggapan yang skeptis dari berbagai pihak terlibat maupun negara-negara yang memang telah menaruh fokus atas sengketa ini. Amerika Serikat secara terang-terangan dipandang sinis dan dianggap memiliki kepentingan besar atas andilnya memperhatikan problematika sengketa. Terlebih dengan adanya China dalam barisan negara pengklaim kawasan Laut China Selatan. Dimana Amerika Serikat dianggap ingin membayangi kekuatan baru Asia yang baru tumbuh dan berusaha untuk ikut menghalangi pencapaian negara tirai bambu itu.

Namun dalam sebuah tulisan ilmiah oleh seorang bernama Mark J. Valencia, telah menerbitkan penguraian terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa berkepanjangan ini;

“Pertama, China memperlakukan garis sembilan-putus-putus sebagai klaim de jure ke seluruh wilayah laut. Jika klaim ini diterima, kebebasan navigasi di sana akan lenyap, melumpuhkan transportasi pelayaran di Asia Tenggara. Kedua, secara bersamaan, setelah meratifikasi Deklarasi ASEAN 1992 di Laut China Selatan, Beijing menarik garis teritorial di sekitar Kepulauan Paracel dan kemudian menyarankan bahwa mungkin akan mengambil tindakan serupa di Spratly.” (Rowan, 2005, p. 249)

Valencia kemudian melanjutkan, kemungkinan yang muncul jika gagasan ini diterima, maka China dapat menuntut agar kapal yang memasuki dan meninggalkan Laut China Selatan mendapatkan izin dari China terlebih dahulu untuk melakukannya, sehingga membatasi jalur laut internasional. Seperti Harvey Feldman, mantan duta besar Amerika Serikat di Asia yang mencatat, bahwa tindakan ini akan mengubah Laut China Selatan menjadi "danau China" (Rowan, 2005, p. 429).

Bukti dari upaya yang Amerika Serikat lakukan kala itu adalah dengan meneruskan aliansi yang sudah ada dan memperkuatnya dengan serangkaian perjanjian baru. Hubungan kerjasama yang berjalan antara Amerika Serikat dan Filipina pada tanggal 14 Maret 2007 yaitu, *Military Base Agreement* (MBA). Perjanjian ini mengatur perihal;

"Sebuah perjanjian militer yang oleh Filipina memberikan Amerika Serikat hak untuk mempertahankan penggunaan pangkalan di Filipina untuk jangka waktu selama 99 tahun, untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan sesuai perjanjian. Serta dapat menentukan sesuai dengan kebutuhan militer, dan untuk masuk ke dalam negosiasi dengan Amerika Serikat tentang perluasan basis atau semacamnya." (Velasco, 2015, p. 83).

Ketentuan lebih lanjut dalam perjanjian itu termasuk pembentukan kelompok penasehat militer yang kemudian diberi nama *Joint U.S. Military Advisory Group* (JUSMAG), bantuan logistik, bantuan pelatihan dan keamanan (Velasco, 2015, p. 83).

Dalam menjalankan fungsinya, JUSMAG memberikan nasihat dan bantuan kepada *Armed Forces of the Philippines* (AFP) tentang pelatihan per-

tahanan dan militer kepada pasukan angkatan bersenjata Filipina. Dalam hal bantuan logistik, Amerika Serikat akan menyediakan peralatan militer, pasukan dan pemeliharaan kepada Filipina. Angkatan bersenjata Amerika Serikat juga akan memberikan pelatihan kepada AFP secara berkala. Pelatihan militer juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat memberi kesempatan kepada tentara Filipina untuk belajar di luar negeri khususnya di Amerika Serikat langsung. Karena ancaman terhadap agresor eksternal, Amerika Serikat juga akan memberikan keamanan dan pertahanan kepada Filipina sementara ia mempertahankan pangkalan-pangkalan di negara tersebut. Termasuk dalam masalah keamanan adalah berbagi informasi keamanan antara kedua negara (Velasco, 2015, p. 83).

Kolaborasi pasukan Filipina yang didampingi oleh pasukan Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa eksistensi dari kekuatan pemerintahan Bush pun serius dalam membahas isu keamanan maritim maupun menekan kekuatan lain yang mencoba untuk naik kepermukaan. Terlebih lagi dengan kesepakatan penempatan pangkalan laut bagi pasukan milik Washington di kawasan perairan milik Manila, ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di Laut China Selatan telah benar-benar hadir dan menduduki tempatnya sendiri dalam dinamika sengketa.

Sementara itu, Amerika Serikat juga semakin mengeratkan hubungan kerjasama yang baru kembali terjalin dengan Vietnam. Telah menjadi bagian dari aliansi Amerika Serikat, Vietnam tidak menghentikan proses kerjasamanya dengan negara adidaya itu begitu saja. Setelah pada masa kepemimpinan Bill Clinton, Hanoi dan Washington masih terus melanjutkan kerjasama dalam beberapa aspek, diantaranya ekonomi dan militer. Ini terbukti dengan bergabungnya Vietnam sebagai anggota dari *World Trade Organisation*

(WTO) atas dorongan dari Amerika Serikat. Meski Amerika Serikat masih belum melepaskan sanksi embargo terhadap Vietnam, namun secara bertahap pemerintahan Bush –berkat penghapusan embargo oleh Bill Clinton– telah melakukan suplay persenjataan untuk pasukan militer Hanoi melalui kesepakatan organisasi ini. Selain itu dengan bergabungnya Vietnam ke dalam WTO, Amerika Serikat memiliki akses dalam mempengaruhi peningkatan perekonomian negara aliansinya ini melalui kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kesepakatan organisasi.

Sejak akhir tahun 2000-an pula, kerjasama hubungan militer antara Amerika Serikat dan Vietnam secara signifikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 kerjasama baru disepakati dengan upaya pelatihan bagi pasukan Vietnam yang dinamai *International Military Education and Training* (IMET). Kerjasama ini dibuat untuk membuka pelatihan bahasa Inggris dari Amerika Serikat terhadap pasukan militer Vietnam. Dua tahun berikutnya Amerika Serikat memodifikasi *International Traffic in Arms Regulations* (ITAR) mengenai lisensi perizinan untuk perdagangan barang dan jasa ke Vietnam. Ini terkait dengan pembelian dan anggaran yang Vietnam keluarkan untuk sektor pertahanan (Manyin, 2012, p. 21).

Pada bulan Juni 2008, pertemuan antara Perdana Menteri Nguyen Tan Dung dan Presiden Bush membicarakan perihal perjanjian bilateral dan langkah-langkah yang diambil untuk memperdalam keterlibatan bilateral. Perkembangan besar termasuk pengumuman pembicaraan politik-militer formal, peluncuran negosiasi perjanjian investasi bilateral, pembicaraan tentang menambahkan Vietnam ke dalam program *Generalized System of Preferences* (GSP), *Foreign Military Sales* (FMS), *the creation of a bilateral education task*, ataupun diskusi Korps

Perdamaian ke Vietnam. Perdana Menteri Dung selaku pejabat tertinggi Vietnam yang menjabat sejak 1975 mengunjungi Menteri Pertahanan Robert Gates di Pentagon dalam pembicaraan internal perihal komunikasi gabungan menjanjikan dukungan Amerika Serikat untuk kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial nasional Vietnam (CSEA, 2010).

Terdapat perbedaan dalam tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dalam keterlibatannya di sengketa Laut China Selatan pada era kepemimpinan Bill Clinton dan George W. Bush. Jika memindai era kepemimpinan Bill Clinton, kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat terkesan lebih cenderung kepada penerapan *soft diplomacy* dengan upaya kerjasama bilateral dan membangun aliansi. Ini terbukti dengan terjalinnya hubungan bilateral Amerika Serikat dengan dua negara aliansinya Filipina dan Vietnam. Dilatar belakangi pula dengan prinsip Amerika Serikat yang saat itu membatasi peran langsung dalam suatu konflik dan mendorong sekutu untuk lebih melibatkan diri, upaya yang dilakukan Clinton ini merupakan cara yang efektif dalam menunjukkan keterlibatannya dalam konflik sebagai pihak ketiga yang lebih banyak memberikan dorongan agar pihak yang berkonflik lah yang mengambil aksi. Meski tidak secara terang-terangan dan memamerkan kemampuan *hard power*-nya di kawasan sengketa, pembuatan kebijakan yang dilakukan bersama Filipina maupun Vietnam setidaknya telah menjadi sebuah pertanda bahwa Amerika Serikat ada disana sebagai pihak ketiga yang berusaha untuk memediasi pihak-pihak bersengketa dan menekan kekuatan pendominas disana.

Perbedaan yang menjadi identitas Bush dalam keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan ini dengan Bill Clinton sebelumnya ialah, adanya tindakan kebijakan yang cenderung bersifat

hard diplomacy. Dimana aksi kerjasama bilateral dengan Filipina yang dilanjutkan oleh Bush adalah dengan adanya perjanjian MBA yang menyertakan JUSMAG sebagai salah satu poin di dalamnya. Perjanjian ini merupakan bukti dimana Amerika Serikat mulai menempatkan pasukannya di dekat perairan sengketa dan bersikap lebih agresif lagi, selain penempatan pasukan bantuan logistik bagi keperluan senjata kepada Filipina juga aktif dilakukan. Penempatan ini juga dilakukan Bush dengan tujuan selain memenuhi kesepakatannya dengan Filipina yakni, berusaha pula untuk menekan kekuatan China dan memperlihatkan kredibilitas kekuatannya militernya. Namun upaya pemerintahan Bush juga diikuti oleh pembangunan kerjasama multilateral, yang mana ditandai dengan bergabungnya Vietnam dalam WTO atas ajakan dan upaya lobilisasi dari Amerika Serikat, yang memberikan dampak pada penjualan persenjataan dan perekonomian Vietnam.

Dua era kepemimpinan Amerika Serikat sebelum Obama ini telah memiliki bentuk kebijakannya sendiri dalam keterlibatannya di sengketa Laut China Selatan. Berangkat dari adanya keharusan menginvasi karena keterlibatan negara aliansinya dalam sengketa, Amerika Serikat sejatinya memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri terlepas dari alasan tersebut. Upaya keterlibatan yang dilakukan oleh Bill Clinton maupun George W. Bush pun memperlihatkan betapa Amerika Serikat juga telah menetapkan alarm terhadap kawasan sengketa di Laut China Selatan. Keresahan tentang munculnya kekuatan baru dan kemungkinan tersainginya eksistensi di bagian timur membuat Amerika Serikat kemudian semakin gencar mempertahankan posisinya. Meskipun kebijakan yang dilakukan Clinton diawal keterlibatan karena adanya perjanjian lain antara Amerika Serikat dengan Filipina-

na, namun persekutuan dan alasan lain mengikuti seiring konflik pun yang masih berjalan.

Dari sekilas keterlibatan Amerika Serikat pada era Bill Clinton dan George W. Bush diatas terhadap konflik di Laut China Selatan, nampak bahwa sederet kebijakan terkait upaya yang sedemikian rupa oleh keduanya tersebut masih belum menuai hasil *final* yang diinginkan berupa penyelesaian masalah sengketa ini. Kondisi kawasan yang masih terbilang tidak stabil, sengketa yang masih terus berjalan bahkan memiliki kecenderungan instalasi yang meningkat. Namun, keterlibatan Amerika Serikat ini berlanjut pada era kepemimpinan Obama. Pembahasan mengenai kebijakan Amerika Serikat di Laut China Selatan pada era kepemimpinan Obama akan dibahas pada bab selajutnya.